

DAMPAK KEBIJAKAN REKONSILIASI MESIR TERHADAP ISRAEL DALAM PERJANJIAN CAMP DAVID 1979-1989

THE IMPACT OF THE EGYPTIAN RECONCILIATION POLICY TOWARD ISRAEL IN CAMP DAVID AGREEMENTS IN 1979-1989

Annisa Nurdiassa

*S1 Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

ABSTRAK

Mesir adalah negara yang memiliki peran penting dan pengaruh yang besar dikawasan Timur Tengah, terbukti dengan berbagai kebijakan politik luar negeri Mesir mampu merubah tatanan politik yang berdampak terhadap stabilitas dikawasan tersebut. Salah satu kebijakan Mesir yang membawa dampak dan perubahan besar dalam kawasan di Timur Tengah khususnya dalam hubungan Mesir dengan negara-negara Arab lainnya adalah kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian antara Mesir dengan Israel dalam perjanjian Camp David 1979, perjanjian tersebut dianggap sebagai penghianatan Mesir terhadap negara-negara Arab dan juga umat Muslim didunia, karena sebelumnya telah diadakan “Sumpah Setia” dan menyatakan perang abadi melawan Israel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah politik luar negeri Mesir dalam dinamika hubungan antara Mesir baik dengan negara-negara Arab maupun dengan Israel sebelum dan sesudah terjadinya perjanjian Camp David 1979 serta dampak kebijakan rekonsiliasi Mesir tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa dampak yang harus diterima Mesir baik dari Organisasi Internasional, maupun negara-negara Arab yang menjadikan Mesir terkucilkan dari Dunia Arab.

Kata Kunci : Mesir, konflik Arab-Israel, Politik Luar Negeri, Perjanjian Camp David 1979, Organisasi Internasional

Egypt is a country that has an important role and influence in the Middle East region, as an evidenced by the various foreign policy of Egypt is able to change the political order which affect the stability of the region. One of the Egyptian policy that took effect major changes in the region and in the Middle East, especially in Egypt's relations with other Arab countries is a peace agreement or peace treaty between Egypt and Israel in the Camp David agreement of 1979, the agreement is regarded as a betrayal of Egypt against-state Arab countries and Muslims in the world, having previously been held

"Faithful Pledge" and declared eternal war against Israel. This study aims to determine the steps Egypt's foreign policy in the dynamics of the relationship between Egypt both with Arab countries and with Israel before and after the Camp David agreements in 1979 and the impact of the Egyptian reconciliation policy. This study is a qualitative study using deductive method and the nature of descriptive research. The results showed some impact must be received by Egypt either from the International Organization, and the Arab countries that made Egypt isolated from the Arab world.

Keywords : Egypt , the conflict Arab - Israeli , Foreign Policy , the Camp David Accords of 1979, International Organizations

PENDAHULUAN

Mesir adalah salah satu negara yang berada di Timur Tengah, negeri tersebut berada di sudut timur laut Afrika. Disebelah barat berbatasan dengan Libya, selatan dengan Sudan, utara dengan Laut Tengah (Laut Mediterania), dan di timur dengan jalur Gaza, Israel, dan Laut Merah. Dengan demikian letak geografis Mesir sangat strategis karena berada pada titik pertemuan dua benua (Asia dan Afrika), sekaligus penghubung Laut Tengah dan Laut Merah yang disambungkan oleh Terusan Suez (Antara News). Mesir juga adalah negara Arab yang paling banyak penduduknya, hampir seluruh populasi terpusat disepanjang sungai Nil, terutama Iskandariyah dan kairo, dan sepanjang Delta Nil dan dekat terusan Suez. Selain itu letak strategis Mesir yang digolongkan sebagai negara maju di Afrika, juga sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur - tengah, dengan demikian Mesir memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam stabilitas di Timur Tengah dalam berbagai Aspek. Dalam menjalankan perannya tersebut, Mesir selalu berdiri dijejeran terdepan dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di timur Tengah. Pengaruhnya sangat cepat menyebar ke negara-negara Arab sekitarnya, sehingga Mesir disebut-sebut sebagai negara induk bagi negara-negara di wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa Mesir adalah negara yang paling menentukan dalam mengubah konstelasi politik dunia Arab. Sejarah membuktikan, setiap getaran politik di Mesir pasti memiliki dampak baik secara ekonomi maupun politik keseluruhan kawasan Timur Tengah.

Faktor lain yang mendukung dan menjadikan Mesir sebagai kekuatan utama di Timur Tengah adalah; yang pertama, dari segi politik Mesir memiliki kultur berbeda dengan negara lain. Dimana sistem pemerintahan Mesir yang sering mengalami masa transisi dari masaa ke masa sehingga kekuatan politik oposisi pemerintah dan sistem demokrasi memungkinkan berkembang untuk kestabilan politik di Timur Tengah. Pada tahun 1952, terjadi revolusi yang menumbangkan kekuasaan absolut Raja Farouk. Revolusi yang dipimpin Kolonel Gamal Abdul Nasser itu mengubah system pemerintahan monarki yang berakar dari masa lampau menjadi sebuah pemerintahan modern berbentuk Republik. Mesir menjalankan roda pemerintahan secara dinamis

dengan menjanjikan reformasi di segala bidang. Kejutan Politik Luar negeri Mesir pada tahun 1955 dengan mengenalkan ide persatuan Arab (Pan-Arab). Tahun ini pula Mesir berperan aktif pada konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung. Dua momentum politik itulah yang menandai mulai terlibatnya Mesir dan aktifnya negara Piramida tersebut dalam gelanggang percaturan politik Internasional. Dan yang kedua, dari segi militer, militer Mesir dimata kalangan rakyat Timur Tengah masih dianggap sebagai penyelamat. Hal ini tidak terlepas ketika Mesir berhasil mendepak Farouk yang menjadi boneka Inggris dan pernah mengalahkan Israel dalam perang 1977, serta menghancurkan benteng yang paling terkenal milik Israel, yaitu Barlev (Anhar, 2010).

Jika diperhatikan lebih dalam, maka akan ditemukan suatu kejanggalan dalam perjanjian damai yang dilakukan oleh negara Mesir dan negara Israel, mengingat bahwa berdasarkan sejarah, terdapat beberapa konflik antara negara-negara Arab (termasuk Mesir) dengan Israel yang disebut dengan konflik Arab-Israel. tercatat bahwa terjadi perang selama empat kali antara Arab dan Israel yaitu di tahun 1948, 1956, 1967, dan 1973. Dan Mesir ikut berperang dalam melawan Israel disetiap konflik tersebut.

Dalam perjalanan tarik ulur konflik Arab-Israel, Mesir adalah yang menjadi tonggak utama Israel dalam penyelesaian konflik dan permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk keamanan Israel itu sendiri, hal ini mengingat bahwa Mesir adalah negara terbesar, terkuat, dan paling berpengaruh di antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Israel. Berada di dataran rendah dan wilayahnya yang terlalu sempit dan dikepung negara-negara yang bermusuhan, Israel adalah negara yang sangat rentan dari sisi keamanan dan pertahanan. Permusuhan dengan Mesir berarti ancaman yang demikian besar bagi pertahanan dan keamanan negeri itu, bahkan eksistensinya di kawasan. Sebaliknya kerjasama keamanan dengan Mesir amat berguna bagi kepentingan keamanan dan pertahanan Israel (Dr. Burdah, 2012). Selain karena posisi Mesir yang sangat berpengaruh ditengah-tengah Arab lainnya, juga terdapat kepentingan strategis Israel yang lain di kawasan Timur Tengah yaitu normalisasi hubungan dengan negara-negara disekitarnya, terutama dalam bidang ekonomi. Mengingat Israel adalah negara yang hingga kini masih terkucil dalam pergaulan kawasan. Memelihara perdamaian dengan Mesir diharapkan akan menjadi pintu masuk untuk membangun hubungan lebih norma dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Sehingga kerjasama dengan Mesir adalah hal yang mutlak bagi Israel.

Menanggapi hal tersebut selain perang, dalam kenyataannya antara bangsa Israel dan bangsa Arab juga banyak menempuh jalur diplomasi, salah satunya adalah kesepakatan damai Mesir-Israel di Camp David (1978). Saat itu Mesir diwakili presiden Anwar Sadat dan Israel oleh PM. Manechim Begin, dengan disaksikan Presiden Jimmy Carter saling mengakui kedaulatan masing-masing. Sebagai imbalannya, Israel mengembalikan Gurun Sinai yang dikuasainya sejak perang 1967 kepada Mesir. Perjanjian inilah yang dianggap sebagai "Penghianatan" Mesir yang saat itu di pimpin oleh Anwar Sadat

terhadap negara-negara Arab dan umat muslim di dunia karena sebelumnya (saat Gamal Abdul Nasser berkuasa) telah diadakan “*sumpah setia*” dan menyatakan “Perang Abadi” terhadap Israel (Meatos, 2013).

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam menjelaskan pembahasannya penulis menggunakan Politik luar negeri dan konsep Organisasi Internasional. Politik luar negeri adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan mempergunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada, serta ditujukan untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik kapabilitas, institusi dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai bangsa-negara (Perwita & Yani, 2011, hal. 49).

Dalam hal ini dijelaskan bahwa, jika dikaitkan dengan konteks skripsi ini, maka politik luar negeri Mesir Pasca Perjanjian Camp David 1979 dan setelah kematian Anwar Sadat 1981 dan di gantikan oleh Husni Mubarak adalah tetap membawa arah politik luar negeri Mesir Condong ke Amerika, bukan saja karena desakan ekonomi dalam negeri dan kedekatan ideologis (ideologi liberal), tetapi juga karena desakan situasi, khususnya situasi dunia Arab yang tetap tidak menentu. Hanya saja dalam pembuatan keputusan politik Mesir di bawah kepemimpinannya, Mubarak lebih berhati-hati dan lebih mengutamakan hasil kesepakatan bersama atau konsensus. Selain itu Mubarak Juga mengupayakan dunia Arab bersedia menerima kehadiran Mesir kembali dengan melakukan serangkaian langkah diplomatic (Antara News).

Sedangkan dalam konsep Organisasi Internasional, Menurut Pariera Pandelangi Organisasi internasional memiliki arti ganda, yakni dalam arti luas dan sempit. Organisasi dalam arti luas maksudnya adalah organisasi yang melintasi batas negara (internasional) baik bersifat public maupun privat, sedangkan organisasi dalam arti sempit adalah organisasi internasional yang hanya bersifat public (Amalia, 2012). Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Perwita & Yani, 2011, hal. 92). organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung.

Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor independen. Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara (Perwita & Yani, 2011, hal. 95). Sebagai suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak terkait.

Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan status negara-negara Arab yang bersatu dan menjadikan identitas diri mereka sebagai negara-negara Arab yang tergabung dalam organisasi internasional dalam lingkup region (*regional*) yaitu Liga Bangsa Arab maupun dalam lingkup non-region seperti OKI dan GNB. Selain karena letak geografis yang saling berdekatan, mereka juga mengklaim bahwa mereka berasal dari satu bangsa yang sama yaitu Bangsa Arab. Hal tersebutlah yang melekat didalam masing-masing negara anggota. Selain itu juga karena adanya beberapa persamaan lainnya, seperti nilai-nilai, budaya, bahkan visi misi yang sama. Fakta mengatakan bahwa mayoritas anggota Organisasi baik Liga Arab, OKI dan GNB hingga saat ini masih dihadapkan pada masalah konflik dan ini merupakan fenomena global yang menuntut penyelesaian.

Sehingga ketika Mesir melakukan Perjanjian Perdamaian dengan Israel dalam perjanjian Camp David 1979, Mesir dianggap telah keluar dan menyimpang dari nilai-nilai, budaya dan visi misi yang dibangun bersama yaitu perang abadi melawan Israel. Liga Arab, OKI dan GNB lantas mengambil langkah atas perannya sebagai aktor independen dalam sebuah organisasi dengan mengeluarkan Mesir dari keanggotaan organisasi tersebut. Hal ini membawa situasi atau kondisi dimana Mesir terisolasi dan dikucilkan dalam dunia Arab Pasca Perjanjian Camp David 1979. Alih-alih mendapatkan perlakuan tersebut, baik dari Organisasi internasional maupun negara-negara Arab, Mesir kembali mengandalkan dan berupaya agar organisasi-organisasi internasional bisa menjadi aktor penengah atau mediator dalam konflik yang terjadi dalam internal bangsa Arab. Dalam hal ini pula Mesir juga melakukan pendekatan dengan organisasi-organisasi regional maupun internasional untuk kembali memperbaiki hubungan, mengingat baik OKI (organisasi kerjasama islam) maupun Liga Bangsa Arab dan GNB (Gerakan Non-Blok) sempat membekukan atau menggantung keanggotaan Mesir dalam Organisasi tersebut pasca perjanjian damai Camp David 1979.

PEMBAHASAN

Dinamika hubungan Mesir dengan negara-negara Arab dan Politik Luar Negeri Mesir (anti-Israel) sebelum Perjanjian Camp David tahun 1979

Berbicara mengenai hubungan Mesir dengan negara-negara Arab lainnya dikawasan Timur tengah tidak dapat dilepaskan dengan berbagai keanekaragaman ideologi. Dimana ideologi suatu negara menentukan visi dan misi serta menunjukkan tindakan negara tersebut. Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang subur bagi bersemainya berbagai ideologi (Jatmika, Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, 2014, hal. 39). Misalnya Ideologi Islam (Sunni dan Syiah), ideologi Kristen (kristen koptik dan kristen maronit), Yahudi dan Zionisme, Sekularisme di Turki, Sosialisme Arab, Pan Arabisme, dan Pan Islamisme. Mesir sendiri adalah negara penganut Sunni (Ahl as-Sunnah wal Jama'ah) beserta Saudi Arabia, Kuwait, Turki, Libya, Suriah, Sudan, dan sebagainya. Adanya keanekaragaman ideologi menjadi salah satu faktor konflik dikawasan tersebut, namun tidak serta merta menjadikan negara-negara Arab bercerai-berai. Negara-negara Arab bersatu dalam ideologi Pan Arabisme dan Pan Islamisme.

Hubungan Mesir dengan negara-negara Arab terjalin dan bersatu didalam Organisasi Pan-Arabisme (Liga Arab) dan Pan-Islamisme (OKI) dan juga Organisasi lainnya yaitu GNB (Gerakan Non-Blok). Tercatat dalam sejarah dunia bahwa antara negara-negara Arab dengan Israel telah menjadi musuh di kawasan Timur Tengah yang telah berjalan lama. Konflik yang melibatkan dunia Arab dan Israel ini sebenarnya sudah terjadi perebutan wilayah yang sama-sama dijanjikan oleh Inggris. Inggris yang tidak mampu lagi mengendalikan situasi dan menghentikan kerusakan meminta bantuan dari PBB yang baru saja dibentuk. Pada tanggal 15 Mei 1947 PBB membentuk sebuah komite dengan nama UNSCOP. Setelah lima minggu melakukan pembicaraan dan penelitian, komite merekomendasikan pembagian Palestina menjadi wilayah Arab dan Yahudi. "*Two State solution*" diterima dengan keluarnya resolusi 181 majelis umum PBB pada November 1947 dengan dukungan suara 33 dan menentang 13 serta abstain 10. Resolusi tersebut merupakan pembagian wilayah yang didasarkan pada jumlah penduduk dari kedua belah pihak dan kepemilikan tanah. Kelompok Yahudi menerima pembagian wilayah seperti yang tertuang dalam resolusi 181 tahun 1947. Resolusi yang dikeluarkan sebagai dasar untuk berdirinya dua negara Israel dan Palestina yang merdeka ini ditolak oleh negara-negara Arab karena menganggap negara Israel adalah negara Bani Israil yang beragama Yahudi yang tidak berhak tinggal di tanah Arab, meskipun dalam kenyataannya jumlah populasi dan penguasaan Yahudi atas tanah di wilayah itu tidak bisa dipungkiri, karena yahudi menguasai tanah-tanah tersebut hasil dari pembelian tanah dari penguasa Turki dan orang-orang Arab muslim Palestina.

Puncaknya adalah di tahun 1948 dimana Israel mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, hal tersebut ditolak oleh negara-negara Arab termasuk Mesir. Hal ini yang dikenal sebagai konflik pertama Arab-Israel. Mesir dibawah pemerintahan Gamal Abdul Nasser melakukan politik luar negeri Anti-Israel dengan melakukan beberapa penyerangan bersama negara-negara Arab lainnya yang mengakibatkan beberapa Perang antara Arab-Israel, yaitu ditahun 1948, 1956,1967 dan 1973.

PERDAMAIAN MESIR DENGAN ISRAEL DALAM PERJANJIAN CAMP DAVID 1979 DAN POLITIK LUAR NEGERI MESIR PASCA PERJANJIAN CAMP DAVID 1979

Babak baru politik Mesir dimulai bersamaan dengan kematian Nasser tanggal 29 September 1970 yang kemudian digantikan oleh Anwar Sadat. Kondisi Mesir yang saat itu dalam ketidakstabilan karena konflik kawasan dan kekalahan yang diterima Mesir setelah perang tersebut menimbulkan strategi dan inisiatif baru bagi Mesir untuk menyelesaikan Konflik panjang antara negara-negara Arab dengan Israel. Sebagai negara yang memiliki peran penting dalam kawasan Timur Tengah, Mesir yang saat itu dibawah pemerintahan Anwar Sadat mengambil kebijakan yang kontroversial dimata Dunia Arab yaitu melakukan perjanjian damai dengan Israel dalam perjanjian Camp David 1979. Perjanjian Camp David adalah perjanjian damai antara Mesir dengan Israel, yang saat itu Mesir di wakili oleh Presiden Anwar Sadat dan Israel diwakili oleh Perdana Mentrinya yaitu Menachim Begin, dengan disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Dalam perjanjian tersebut kedua negara saling mengakui kedaulatan masing-masing. Sebagai imbalannya, Israel mengembalikan Gurun Sinai yang dikuasainya sejak perang enam hari antara negara-negara Arab dengan Israel tahun 1967 kepada Mesir. Dengan perjanjian tersebut, Mesir menjadi negara Arab pertama yang dapat melakukan pendekatan dan kontak langsung dengan Israel. Perjanjian damai tersebut juga mengantarkan Mesir pada aliansi strategis dengan Amerika Serikat dan Barat yang saat ini diakui sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh dan ikut menentukan prospek proses perdamaian di Timur-Tengah (Anhar, 2010).

Perjanjian Camp David 1979 merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih Amerika Serikat antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Perjanjian damai Camp David ini merupakan perundingan rahasia selama 12 hari yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Jimmy Carter. Perjanjian ini memiliki tiga komponen penting yaitu pengakuan Arab terhadap Israel dalam perdamaian, penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah pendudukan yang diperoleh selama perang serta negara-negara Arab tidak akan mengancam keamanan Israel dan Yerusalem berada dalam kawasan Israel yang tidak dapat bagi dan dicampuri oleh siapapun.

Perjanjian ini diletarbelakangi oleh konflik panjang antara Mesir dan Israel sejak berdirinya negara Israel tahun 1948. Akibat perang berkepanjangan yang dialaminya, Mesir menyadari bahwa masalah dengan Israel tidak dapat diselesaikan dengan pertempuran dan upaya diplomatik pun dimulai. Hal ini diletarbelakangi juga dengan adanya impian masyarakat Timur Tengah untuk hidup damai sehingga kerjasama antar negara-negara di Timur Tengah dapat terwujud untuk mengelola sumber daya alam dan manusia yang mereka miliki bisa dicapai secara maksimal dibandingkan dengan peperangan yang hanya akan menyebabkan kerusakan. Oktober tahun 1977 Inisiatif Presiden Mesir Anwar Sadat untuk mengunjungi Yerusalem dan disambut dengan baik oleh Parlemen, kunjungan tersebut kemudian dibalas oleh Perdana Menteri Israel. Sambutan positif dari kedua negara ini menciptakan peluang perdamaian antara ke dua negara (Makoto Mizutani, 1996).

Mesir yang semula negara paling konsisten dalam menentang Israel dalam permasalahan wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel, dengan beberapa kali perlawanan militer terhadap Israel kini telah berubah menjadi sebuah sejarah dramatis, dimana Mesir yang saat itu dipimpin oleh Anwar Sadat membuat perdamaian dengan Israel. inisiatifnya ini dimulai dengan kunjungannya ke Yerusalem dan pidatonya di hadapan Parlemen Israel, pada November 1977. kedua negara tersebut (Mesir-Israel) menjadi semakin dekat. Hal ini bisa dilihat dari intensitas pertemuan dan kunjungan para pejabat Israel ke Mesir yang semakin meningkat, mulai dari PM Ehud Barak, Menteri Luar Negeri Shlomo Ben Ami, hingga ketua Partai Meretz, Yossi Sarid (Rifa'i, 2013). Pasca penandatanganan perjanjian perdamaian tersebut (Camp David 1979) yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, hubungan Mesir dengan negara Paman Sam itu semakin dekat, terbukti Mesir mendapatkan paket bantuan substantif dari Amerika termasuk bantuan militer. Bantuan tidak diberikan secara cuma-cuma, sebagai timbal baliknya Mesir harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan Israel. Sejak saat itu Mesir menjadi tergantung pada Amerika terutama militer Mesir karena sebagian besar alutsista militer Mesir merupakan sumbangan dari Amerika. Bantuan yang diterima Mesir dari Amerika Serikat baik bantuan ekonomi maupun militer sudah ada sebelum perjanjian Camp David itu sendiri, namun menjadi lebih efektif dan berkelanjutan pasca Perjanjian Camp David 1979.

Tercatat bahwa dalam pemerintahan Carter Mesir mendapat bantuan dana sebanyak \$ 1,1 milyar sebagai bantuan militer dan telah disetujui pembelian pesawat F-16 fighter dan perlengkapan-perengkapan militer lainnya dalam masa dua tahun mendatang. Selain itu Mesir juga akan menerima kira-kira 35 buah pesawat tempur jenis F-4R, 250 tank jenis M-60, kira-kira 16 pesawat tempur jenis F-16 dan sebelumnya telah disetujui pula pembelian pesawat tempur jenis F-15 (Hermawati, 2005, hal. 70). Dibandingkan dengan Para pendahulunya, Carter adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang berhasil melakukan diplomasi di Timur Tengah dalam penyelesaian konflik panjang Arab-Israel. perjanjian damai antara Mesir dengan Israel

tersebut menjadi sebuah prestasi dan catatan sejarah bagi Carter dan juga Amerika Serikat (Spiegel, 1985).

Mesir dibawah pemerintahan Mohammad Husni Mubarak telah berikrar untuk meneruskan perjuangan Sadat tetapi tidak menjamin persamaan dasar. Dimana Mubarak tetap membawa arah politik luar negeri Mesir condong ke Amerika, bukan saja karena desakan ekonomi dalam negeri dan kedekatan ideologis (ideologi liberal), tetapi juga karena desakan situasi, khususnya situasi dunia Arab yang tetap tidak menentu, hanya saja, berbeda dari Sadat, dalam membuat keputusan politik di awal masa pemerintahannya, Mubarak lebih berhati-hati dan lebih mengutamakan konsensus (Antara News). Dalam menentukan kebijakan luar negeri, disatu sisi Mubarak mengupayakan dunia Arab bersedia menerima kehadiran Mesir kembali, tetapi di lain sisi berharap Amerika dan Israel bisa memahaminya. Tanda-tanda semakin jelas membuktikan bahwa beliau mengkaji dengan teliti segala aspek kelemahan rezim itu supaya tidak terulang.

Mesir melakukan serangkaian pendekatan terhadap beberapa negara Arab di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iraq, Yordania, dll termasuk juga Palestina dan kelompok Palestina seperti Hamas dan Fatah dan juga terhadap negara diluar kawasan Timur Tengah yaitu Uni Soviet. Tidak sampai disitu saja Mesir sangat aktif dalam konsolidasi dalam forum GNB (Gerakan Non Blok), Organisasi Pan Arabisme atau Liga Bangsa Arab dan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) sebagai langkah awal untuk kembali mengawali pendekatan terhadap negara-negara Arab. Mesir sangat tau betul akan peran dan fungsi sebuah organisasi, baik itu organisasi internasional maupun organisasi dalam kawasan, sehingga Liga Bangsa Arab dan OKI dianggap mampu menjadi sebuah mediator untuk mengembalikan hubungan baik antara Mesir dengan negara-negara Arab lainnya yang sempat menegang.

Peranan penting yang dimiliki oleh Organisasi internasional adalah perannya yang dapat mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara. Dalam hal ini keputusan Mesir yang diambil dalam perjanjian Camp David 1979 dianggap sebagai keputusan yang telah menciptakan perselisihan diantara negara-negara lainnya, dalam hal ini pula yang dimaksud adalah negara-negara di kawasan di Timur Tengah. Meskipun baik OKI dan Liga Bangsa Arab juga mengeluarkan reaksi keras atas keputusan yang diambil Mesir tersebut, namun dapat segera dinetralisir oleh Mesir yang saat itu menunjukkan kembali peran dan eksistensinya di Dunia Arab. Selain itu juga Mubarak menjauh dari politik dan budaya sekular yang dianggap jauh dari nilai-nilai bangsa Arab dengan mengislamiasikan kancah sosial dan politik. Wacana yang berkembangpun menjadi lebih Islami, dengan diangkatnya nilai-nilai agama oleh pemerintah.

Dampak kebijakan rekonsiliasi Mesir terhadap Israel dalam Perjanjian Camp David 1979-1989

Mesir adalah negara kunci dalam urusan Timur Tengah, terutama mengenai konflik yang terjadi, baik konflik Arab-Israel maupun konflik antar-Arab. Selain karena letak strategisnya, juga karena Mesir mendapat dukungan penuh dari negara-negara Arab dalam penyelesaian berbagai konflik, mengingat Mesir adalah salah satu negara pendiri organisasi kawasan seperti Liga Bangsa Arab dan juga Gerakan Non Blok (GNB), kekuatan politik dan militernya juga menjadi faktor lain yang diperhitungkan oleh negara-negara Arab untuk menjadikan Mesir sebagai negara induk bagi bangsa Arab pada saat itu tepatnya pada masa periode Nasser, Mesir adalah penggerak dikawasannya terutama setelah tahun 1930-an, pertama melalui kegiatan keagamaan kemudian melalui nasionalisme Arab. Saat itu juga Mesir mendapat pengakuan dari lingkup Internasional atas eksistensinya tersebut. Namun, setelah terjadinya penandatanganan dan kesepakatan perjanjian perdamaian antara Mesir dengan Israel (Camp David 1979), peran Mesir dalam urusan Timur Tengah telah menurun tidak hanya dikalangan Pemerintah tetapi juga dalam opini publik. Mesir juga harus kehilangan dukungan politik dari negara-negara Arab dan tidak mendapatkan peran seperti sebelumnya.

Mesir yang awalnya dengan tegas menentang dan melakukan perlawanan terhadap Israel dengan negara-negara Arab lainnya, menjadi berbalik arah melakukan perdamaian dengan Israel yang dianggap sebagai bangsa dan negara penjajah. Mesir juga telah mencederai semboyan "*no recognition, no negotiation, no peace*" yang merupakan semboyan negara-negara Arab terhadap eksistensi Israel pada masa sengketa perang Arab-Israel. Semboyan tersebut memiliki makna bahwa negara-negara Arab selamanya tidak akan mengakui keberadaan Israel di kawasan Timur Tengah sekaligus tidak akan menyediakan jalan untuk berdiplomasi dan bernegosiasi dalam upaya perdamaian, yang diinginkan adalah perang menyingkirkan Israel. Nasser yang memimpin Mesir ketika menjadi aktor penting dalam persatuan Negara Arab dan pendukung semboyan tersebut (Amri, 2014, hal. 74).

Bangsa Arab memandang apa yang telah dilakukan Mesir pada masa itu yaitu dimasa pemerintahan Anwar Sadat terlalu berani dan sama sekali tidak mencerminkan semangat dan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Arab itu sendiri. Mesir dianggap telah melakukan Penghianatan terhadap negara-negara Arab dan muslim di dunia ini, atas peristiwa tersebut Mesir harus menanggung Resiko besar atas perbuatannya itu.

Mesir dikeluarkan dan dikucilkan dari organisasi regional maupun internasional seperti Liga Arab, OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan GNB (Gerakan Non-Blok). Mesir sebagai salah satu pendiri Liga Arab yang memiliki peran penting dalam organisasi Liga Bangsa Arab Pada akhirnya Tanggal 31 Maret tahun 1979,

negara-negara anggota Liga Arab sepakat untuk menggantung keanggotaan Mesir dalam organisasi tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kantor Pusat Liga Arab yang semulanya bertempat di Kairo dipindahkan ke Tunis, Tunisia. Hal itu lebih awal ditandai dari intensitas pertemuan Liga Arab lebih sedikit dilaksanakan di Mesir dan lebih banyak di negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Kuwait, Libya, Qatar, Abu Dhabi dll. Proporsi pertemuan yang diadakan di Kairo menurun dari 70,5 persen pada tahun 1977 (tahun Sadat melakukan kunjungan ke Yerusalem) menjadi 42,2 persen pada tahun 1978 (tahun perundingan perjanjian Camp David). Saham atau bagian Mesir dalam anggaran Liga Arab menurun. Dimana saham Mesir yang berada di atas 40 persen sampai akhir 1950-an namun bergeser menjadi 13,7 persen di tahun 1978 setara dengan kontribusi Kuwait. Tindakan serupa juga dilakukan oleh OKI terhadap Mesir. Mesir juga tidak banyak mendapat dukungan seperti biasanya dan cenderung dikucilkan dari forum OKI dan GBN. Kondisi ini semakin kuat setelah diadakannya pertemuan puncak Negara-negara Arab di Baghdad yang mengeluarkan pernyataan “mengutuk perjanjian Camp David” dan menghasilkan sanksi terhadap Mesir berupa isolasi politik dan pembekuan sumber bantuan keuangan yang sedianya diterima dari beberapa negara petro-dollar Arab (Amri, 2014).

Reaksi keras itu diambil oleh Liga Arab menyusul tindakan Mesir yang bersedia menandatangani Perjanjian Camp David dengan rezim penjajah Israel, Januari tahun 1978. Peristiwa tersebut juga menandai semakin dikucilkannya Mesir dari pergaulan internasional (IRIB Indonesia, 2015). Selain itu Mesir juga harus menerima pemutusan hubungan diplomasi dari negara-negara Arab. Segera setelah Mesir menandatangani perjanjian Camp David 1979, sejumlah Negara Arab dan muslim seperti Libya, Lebanon, Yordania, dan Irak memutus hubungannya dengan negara piramida itu. Berbagai sumber bantuan dari negara-negara Arab dihentikan. Dengan kondisi seperti itu Mesir harus menerima resiko terkucilkan dari dunia Arab pada saat itu. Hal ini menyebabkan berbagai peran politik luar negeri serta keamanan nasional di Mesir menjadi tidak stabil dan menyebabkan ketergantungan yang pada akhirnya juga akan melemahkan peran politik luar negeri dan terus mengakar hingga menghadapi berbagai permasalahan dan kondisi yang berhubungan dengan keamanan negeri Mesir itu sendiri.

Perjanjian perdamaian Camp David tersebut juga menimbulkan reaksi masif, khususnya koalisi muda revolusi yang bahu-membahu dengan warga Mesir berdemonstrasi dalam jumlah besar di Kedutaan besar Israel di Kairo. Para demonstrasi meminta Dewan Agung Militer yang saat ini mengendalikan penuh pemerintahan transisi, agar Mesir merevisi Perjanjian Camp David dan memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Menurut harian umum Al-Ahram, 54% warga Mesir meminta pemerintahan baru Mesir meninjau ulang hubungan diplomatik dengan Israel (Misrawi, 2011). Tekanan opini publik terhadap pemerintah Mesir semakin menjadi-jadi untuk membela hak masyarakat Palestina, warga Mesir ingin Palestina memiliki hak legal mereka untuk memiliki tanahnya. Apalagi setelah adanya revolusi di Mesir, jika ingin

mendapat legitimasi dari bangsa Mesir, pemerintah harus menghormati tuntutan rakyat negara.

Sejak saat itu keadaan politik baik domestic maupun luar negeri Mesir semakin merosot dan dalam upaya normalisasi. Meningkatnya kelompok-kelompok Radikal, kelompok Jihad dari berbagai kalangan. Kekosongan kuasa Mesir telah diganti oleh Presiden Saddam Hussein dari Iraq. Iraq menjadi kuasa baru terkuat di Timur Tengah (Wikipedia, 2012). Adapun dampak lain yang harus diterima Mesir setelah kesepakatan perundingan Camp David 1979, dan memberikan berbagai hasil yang memilukan, diantaranya seperti keluarnya Mesir dalam menyelesaikan perang terhadap musuh bebuyutan bangsa Arab (zionis), yang menyebabkan berbagai perang dan pukulan terhadap negara-negara Arab, hilangnya peran kepemimpinan Mesir dan pengaruhnya terhadap permasalahan-permasalahan penting dan agenda-agenda utama, kurangnya kepemimpinan Mesir dalam mengelola Sinai, sehingga perbatasan bagian timur Mesir tersebut selalu terancam dan tunduk terhadap keinginan Israel. Dengan kata lain Mesir kehilangan peran strategisnya dimata dunia Arab. Selain itu juga Mesir berkomitmen untuk memberikan jaminan keselamatan kepada Israel, dan tidak memberikan kecaman dan ancaman dalam berbagai hal. Sedangkan negara sesama Arabnya Palestina, Mesir belum Mampu menjamin keselamatan dan keamanan Palestina yang hingga hari ini masih terus mendapat kekerasan, pembunuhan dan pembantaian dari bangsa Yahudi, Israel, terjerumusny Mesir pada poros Amerika Serikat dan zionis secara strategi, politik, militer dan ekonomi sehingga menimbulkan ketergantungan bahkan hutang Mesir terhadap Amerika Serikat. Hutang dalam senjata saja Mesir harus dibebani tiap tahunnya sebesar 700 juta dollar. Selain kerugian Mesir yang jelas dan mudah dihitung seperti penurunan perolehan dari biaya tol terusan Suez, berkurangnya wisatawan dll yang berarti kerugian sebesar kurang lebih 9 milyar dollar. Dan yang paling memilukan adalah kekejian bangsa Yahudi terhadap Palestina yang berusaha melaksanakan agenda pendudukan apartheid untuk mewujudkan impian membangun “Israel Raya” menjadi semakin mudah. Keinginan dan sikap untuk menguasai daerah tersebut secara keseluruhan, menghapus seluruh hak palestina dimuka bumi, keamanan dan negara independen, kepemimpinan serta menyeret pimpinan Palestina dalam berbagai kesepakatan dan muktamar-muktamar internasional.

Dan pada akhirnya Presiden Anwar Sadat yang menjadi Presiden Mesir yang menandatangani Perjanjian perdamaian dengan Israel dalam perjanjian Camp David 1979 saat itu harus menanggung dan membayar nyawanya atas perjanjian tersebut. Anwar Sadat meninggal akibat serangan penembakan dari kelompok Radikal yang menentang perjanjian damai tersebut saat melakukan parade militer pada tanggal 6 Oktober 1981 di Kairo, Mesir. Anwar Sadat kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Husni Mubarak.

KESIMPULAN

Perjanjian perdamaian antara Mesir dengan Israel (Perjanjian Camp David 1979) menjadikan Mesir sebagai negara Arab pertama yang melakukan perdamaian dengan Israel yang dianggap sebagai bangsa penjajah oleh Bangsa Arab. Kebijakan rekonsiliasi Mesir terhadap Israel dalam perjanjian perdamaian Camp David 1979 tersebut dianggap sebagai penghianatan Mesir terhadap negara - negara Arab dan umat Muslim didunia. Dampaknya pun sangat buruk bagi stabilitas Mesir itu sendiri di Kawasan Timur Tengah. Mesir dikeluarkan dari Organisasi Internasional seperti Liga Arab, OKI (Organisasi Internasional, dan GNB (Gerakan Non-blok), pemutusan hubungan diplomatik dari negara-negara Arab seperti Libya, Lebanon, Yordania, Irak dan Arab Saudi, serta dampak lainnya harus diterima Mesir berupa kerugian materi maupun moral. Dan dari itu semua membawa Mesir terkucilkan dari Dunia Arab.

Disisi lain Camp David dianggap sebagai sebuah prestasi penting di Timur Tengah yang menjadi titik balik Timur Tengah dalam pencapaian suatu perdamaian di kawasan ini (Makoto Mizutani, 1996, hal. 38). Mengingat Perjanjian Camp David 1979 adalah perjanjian perdamaian yang pertama yang dilakukan oleh Bangsa Arab (Mesir) terhadap Israel, namun setelah Mesir, menyusul negara-negara Arab lainnya seperti Arab Saudi dan Yordania melakukan perdamaian bahkan membuka ruang kerjasama dengan negara Zionis Israel

Keberhasilan terbesar politik luar negeri Mesir terjadi di tahun 1984 dimana Mesir diterima kembali menjadi anggota OKI, dan memulihkan hubungan diplomatik Mesir dengan Yordania pada September 1984 yang didahului pemulihan hubungan Mesir dengan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) dan puncaknya tepat 1 decade dari waktu penandatanganan perjanjian perdamaian Camp David 1979, yaitu di Tahun 1989 Mesir kembali bergabung kedalam organisasi Liga Bangsa Arab yang menjadi tanda bahwa hubungan Mesir dengan negara-negara Arab yang sempat menegang dan memburuk akhirnya sudah kembali membaik dan bersatu.

Referensi

- Amalia, N. R. (2012). Kegagalan Liga Arab dalam Penanganan Konflik Suriah 2011. *Skripsi SI* , 10.
- Amri, U. (2014). Masa Depan Mesir Pasca Pemerintahan Hosni Mubarak. *Skripsi SI* , 74-75.

Anhar, Y. (2010). Peran Mesir dalam Proses Perdamaian di Timur Tengah antara Israel dengan Hamas. *Skripsi SI* , 23.

Anhar, Y. (2010). Peran Mesir Dalam Proses Perdamaian di Timur Tengah antara Israel dengan Hamas. *Skripsi SI* , 33.

Antara News. (n.d.). *Ekonomi memburuk musuh utama mubarak*. Retrieved Oktober 28, 2015, from Antara News: <http://www.antarane.ws.com/print/245140/ekonomi-memburuk-musuh-utama-mubarak>

Antara News. (n.d.). *Ekonomi memburuk musuh utama mubarak*. Retrieved oktober 28, 2015, from Antara News: <http://www.antarane.ws.com/print/245140/ekonomi-memburuk-musuh-utama-mubarak>

Antara News. (n.d.). *Ekonomi Memburuk, Musuh utama Mubarak*. Retrieved Oktober 28, 2015, from Antara News: <http://www.antarane.ws.com/print/245140/ekonomi-memburuk-musuh-utama-mubarak>

Dr. Burdah, I. M. (2012, September 21). *Anomali Hubungan Mesir-Israel*. Retrieved Agustus 13, 2015, from FSAI: <http://fsaijogja.wordpress.com/2012/09/21/anomali-hubungan-mesir-israel/>

Hermawati, H. D. (2005). Modernisasi Politik Mesir Pada Masa Husni Mubarak. *Skripsi SI* , 68-69.

IRIB Indonesia. (2015, Maret 31). *Keanggotaan Mesir pada Liga Arab Digantung*. Retrieved 11 31, 2015, from IRIB Indonesia: <http://indonesian.irim.ir/editorial/fokus/item/93629-keanggotaan-mesir-pada-liga-arab-digantung>

Jatmika, S. (2014). *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Maharsa Publishing House.

Makoto Mizutani. (1996). *The Midle East Into the 21st Century, The Japan Lectures and other studies on the Arab-Israeli Conflict, the Gulf crisis and Political Islam*. UK: Garnet Publishing Limited.

Meatos. (2013, januari 05). *Perjanjian Camp David*. Retrieved agustus 10, 2015, from Meatos: <http://www.meatos.com/wp/?p=201>

Misrawi, Z. (2011, September 2). *Babak Baru Relasi Israel-Mesir*. Retrieved 12 10, 2015, from KOMPAS: <http://m.kompas.com/health/read/2011/09/02/02281785/babak.baru.relasi.israel-mesir>

Perwita, B., & Yani, Y. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rifa'i, A. (2013, April 25). *Hubungan Diplomatik Mesir dengan Israel Pasca Camp David*. Retrieved 11 19, 2015, from blogspot: <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/hubungan-diplomatik-mesir-dengan-israel.html?m=1>

Spiegel, S. L. (1985). *The Other Arab-Israeli Conflict, Making America's Middle East Policy, From Truman to reagan*. London: The University Of Chicago Press, Ltd., London.

Wikipedia. (2012). *Perjanjian Kem David*. Retrieved Desember 10, 2015, from Wikipedia: https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Kem_David